

ABSTRAK

Keanekaragaman kekayaan alam Indonesia hampir sebagian besar dijumpai dikawasan hutan. Bagian terbesar hutan – hutan Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropis yang terletak di dataran rendah. Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana yang tercermin didalam UUD 1945 didalam Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan Bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki kekuatan Hukum Tetap. Yang dimaksud Negara yang memiliki Hukum tetap adalah Negara yang menegakan Supremasi Hukum untuk menegakan Kebenaran dan keadilan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kebakaran hutan yang terjadi di kalimantan diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Hutan memiliki 3 peranan penting yang perlu kita ketahui yakni Fungsi Konservasi, Fungsi Pelindung dan Fungsi Konservatif yang mempunyai sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah Menurut Undang – Undang NO. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Identifikasi masalahnya ialah : 1) Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan yang terjadi di kalimantan Menurut Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan? 2) Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum terhadap pelaku pembakaran hutan yang terjadi di kalimantan serta pemberian hukuman terhadap korporasi dengan hukuman yang sangat ideal dan efektif dalam pertanggungjawaban korban yang terkena asap dari kebakaran hutan tersebut? Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis berbagai dampak kebakaran hutan dan lahan di kalimantan dan Mengidentifikasi penyebab kebakaran hutan dan lahan serta pertanggungjawaban korporasi terhadap korban yang terkena dampak asap dari kebakaran hutan tersebut. Metode Penelitian ini : Metode Pendekatan yang menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian adalah dengan menggunakan pendeskripsian analisis. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakannya adalah yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Kesimpulannya : 1) apabila para pelaku yang melakukan pembakaran hutan akibat ulah tangan manusia yang mengakibatkan korban berjatuhannya maka pelaku haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dan harus bisa diadili di Muka sidang Pengadilan tersebut. Sehingga didalam putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan maka memiliki sifat positif yang dilihat dari segi Represif maupun Preventif. 2) dengan penal Policy saja untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kehutanan pun tidak dapat teratasi. Maka dengan citizen lawsuit (gugatan warga) pemerintah dapat bertanggungjawab atas kasus kebakaran hutan yang terjadi di kalimantan yang dilakukan oleh warga yang menggugat pemerintah di pengadilan dengan menang. Dan no penal Policy (faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana dibidang kehutanan) Maka pemerintah harus bisa berupaya mengkaji ulang dengan memberikan arahan responsif kepada masyarakatnya, dan social Policy (pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus menyentuh kepentingan seluruh rakyat seimbang dan merata).

Kata Kunci : Citizen Law Suit, Social Policy dan Non Penal

ABSTRAKS

The diversity of Indonesia's natural wealth is mostly found in the forest area. The largest part of Indonesia's forests is included in tropical rain forests located in the lowlands. The State of Indonesia is a State of Law, as reflected in the 1945 Constitution in Article 1 Paragraph 3 states that the State of Indonesia is a State that has the power of Permanent Law. What is meant by a state that has permanent law is a state that upholds the rule of law to uphold the truth and justice, there is no power that cannot be accounted for. Forest fires that occur in Kalimantan are caused by several factors, namely natural factors and human factors. Forests have 3 important roles that we need to know, namely Conservation Function, Protective Function and Conservative Function which have as protection of life support systems to regulate water management, prevent flooding, control erosion, prevent sea water intrusion and maintain soil fertility According to Law NO. 41 of 1999 concerning Forestry. Identification of the problem is: 1) What is the law enforcement of forest fires that occur in Kalimantan according to Law No. 41 of 1999 concerning Forestry? 2) How is the Law Enforcement Implementation against the perpetrators of forest fires that occurred in Kalimantan as well as the punishment of corporations with a very ideal and effective punishment in the responsibility of the victims affected by smoke from the forest fires? and Identifying the causes of forest and land fires and corporate responsibility for victims affected by the smoke from the forest fires. This Research Method: Approach Method that uses Normative Juridical Approach Method, Research Specification is to use analytical description. The methods and data collection techniques used are those consisting of Primary, Secondary and Tertiary Legal Materials. In conclusion: 1) if the perpetrators who carried out forest fires due to human actions caused the victims to fall, the perpetrators must be responsible for these actions and must be tried in advance of the court hearing. So in the decisions that have been issued by the court it has a positive nature seen in terms of repressive and preventive. 2) with just a policy penalty to prevent and tackle forestry crime can not be overcome. So with citizen lawsuit (government lawsuit) the government can be responsible for cases of forest fires that occurred in Kalimantan conducted by citizens who sued the government in court by winning. And no Penal Policy (factors - factors that cause a crime in the field of forestry) Then the government should be able to try to review by giving responsive directions to the people, and social policy (development carried out by the government must touch the interests of all people balanced and equitable).

Keywords: Citizen Law Suit, Social Policy and Non Penal